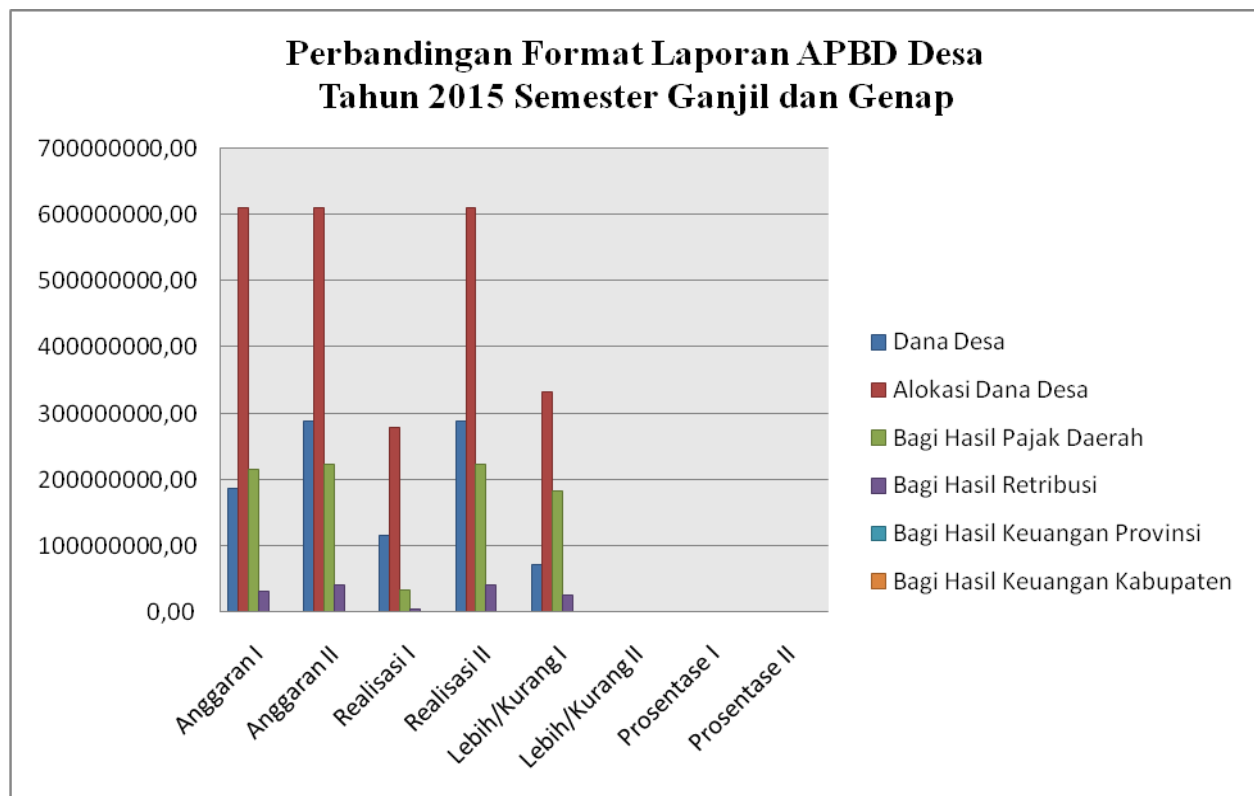


B. Gambaran Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Tempel

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ada di desa Tempel merupakan anggaran yang sudah memenuhi karakteristik Transparansi dan Akuntabilitas untuk menuju *Good Governance* dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik. Dalam meningkatkan sebuah desa menjadi desa yang lebih maju dalam bentuk *good governance*, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berpedoman pada undang-undang dan peraturan kebijakan yang ada, diperlukan suatu partisipasi masyarakat atau kerjasama pemerintahan desa dengan masyarakat dalam meningkatkan mutu desa, karena tanpa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam meningkatkan desa tidak akan berkembang dan berkualitas. Untuk itu, desa dikatakan maju ketika desa tersebut sudah memenuhi prinsip-prinsip *good governance*. Anggaran pendapatan dan belanja desa yang berada di desa tempel merupakan anggaran yang sudah berproses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Terdapat suatu perbedaan formalisasi anggaran pendapatan dan belanja desa yang ada di desa tempel pada semester ganjil dan genap tahun 2015.



Tabel. 9

Dapat disimpulkan dari tabel di atas bahwa banyaknya dana dari bagi hasil keuangan provinsi pada semester ganjil lebih sedikit dibandingkan dengan banyaknya dana pada semester genap, dan pemasukan dana desa pada semester ganjil lebih sedikit dibanding dengan semester genap. Pada formalisasi anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2015 yang berada di desa Tempel memiliki perbedaan, yang mana dana desa dan bagi hasil keuangan provinsi lebih banyak pemasukan dana pada semester genap dibanding dengan semester ganjil. Perbandingan tersebut merupakan bagian dari proses perubahan APBDesa. Perbedaan APBDesa tersebut merupakan perbedaan yang terdapat suatu perubahan atau peningkatan dalam APBDesa pada tahun 2015. Karena pada tahun

dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif. Paradigma birokrasi sebagai pusat pelayanan publik seyogyanya diikuti dengan deregulasi berbagai aturan, sehingga proses sebuah usaha dapat dilakukan dengan efektif dan efisiensi. Dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pemberdayaan, partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintahan.

Dalam melaksanakan pembangunan harus ada sebuah rangsangan dari pemerintahan agar masyarakat dalam keikutsertaan memiliki motivasi. Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, pemerdayaan dan lain lain dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan efisiensi sesuai dengan peraturan dan kebijakan pemerintah yang ada maka diperlukana suatu inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi.